

MENUJU DESA SEJAHTERA (WELFARE VILLAGE) : PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN MELALUI PERENCANAAN RUANG PARTISIPATIF BERBASIS POTENSI DESA

Oleh :

Dhanny Septimawan Sutopo

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Malang
email: sutopo_dhanny@ub.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 11 Maret 2024
Revisi, 30 April 2024
Diterima, 3 Mei 2024
Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Desa Sejahtera,
Pemberdayaan,
Ruang Partisipatif,
Potensi Desa.

ABSTRAK

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu prioritas utama dalam memastikan kesejahteraan masyarakat desa. Artikel ini membahas tentang konsep "Desa Sejahtera" atau Welfare Village yang menekankan pada pemberdayaan pembangunan pedesaan melalui perencanaan ruang partisipatif berbasis potensi desa. Metode perencanaan ruang partisipatif memungkinkan masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, sehingga dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan desa. Artikel ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan visi Desa Sejahtera. Kesimpulannya, perencanaan ruang partisipatif berbasis potensi desa menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan pedesaan yang holistik dan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Dhanny Septimawan Sutopo
Afiliasi: Universitas Brawijaya
Email: sutopo_dhanny@ub.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa memegang peranan penting sebagai komponen integral dalam upaya mencapai pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam dinamika perkembangan global dan nasional, konsep "Desa Sejahtera" atau Welfare Village telah diangkat sebagai paradigma pembangunan desa yang menekankan pada kesejahteraan holistik masyarakat desa, melampaui indikator-indikator ekonomi semata (Smith, J., & Johnson, 2018).

Dalam konteks pembangunan desa yang komprehensif, penataan ruang partisipatif berbasis potensi desa muncul sebagai pendekatan yang relevan dan strategis. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat desa untuk berperan aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi pembangunan desa mereka. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada, serta merumuskan inisiatif

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Hidayat', 2023).

Salah satu tujuan utama dari pendekatan penataan ruang partisipatif ini adalah menciptakan desa mandiri yang sejahtera. Desa mandiri sejahtera ini mencerminkan visi pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup, serta keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Pamungkas, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mendalami konsep pembangunan desa melalui lensa penataan ruang partisipatif berbasis potensi desa. Kami akan mengeksplorasi bagaimana integrasi antara pemberdayaan masyarakat, perencanaan ruang partisipatif, dan pengembangan potensi desa dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan desa mandiri sejahtera. Selain itu, artikel ini juga akan membahas langkah-langkah konkret menuju terwujudnya visi Desa Sejahtera di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi yang berharga bagi pengembangan

kebijakan dan praktik pembangunan pedesaan di berbagai konteks.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menjelajahi konsep pembangunan desa melalui penataan ruang partisipatif, penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk literatur akademis, laporan pemerintah, dan studi kasus terkait pembangunan desa di Indonesia dan negara-negara lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan penataan ruang partisipatif berbasis potensi desa menurut Gai (2024) merupakan suatu pendekatan yang memberdayakan masyarakat desa untuk turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Dalam konteks ini, menurut Setyowati (2019) penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan dukungan yang memadai, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya, kapasitas, dan kelembagaan (Gai et al., 2024; Setyowati, 2019).

Salah satu contoh implementasi dari konsep ini adalah konsep Desa Mandiri. Desa Mandiri adalah konsep pembangunan desa yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi lokal mereka secara berkelanjutan (Purwono et al., 2021). Beberapa contoh Desa Mandiri yang sukses di Indonesia adalah Desa Wisata Nglangeran di Gunungkidul, Yogyakarta, dan Desa Sadu di Kabupaten Tabanan, Bali. Kedua desa ini berhasil mengoptimalkan potensi alam dan budaya mereka untuk mengembangkan sektor pariwisata, pertanian organik, dan kerajinan lokal (Murthi et al., 2022).

Langkah-langkah Menuju Welfare Village di Indonesia: Identifikasi Potensi Desa: Langkah pertama dalam menuju desa mandiri adalah mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, baik potensi alam, budaya, maupun sumber daya manusia.

a. Potensi Alam

Desa-desanya di Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari tanah subur, sumber air bersih, hingga keanekaragaman hayati. Identifikasi potensi alam ini penting untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa (Sutopo et al., 2022).

b. Potensi Budaya

Budaya lokal di desa-desanya memiliki nilai-nilai tradisional, seni, dan kearifan lokal yang unik. Identifikasi potensi budaya ini dapat mendorong pengembangan industri kreatif, pariwisata budaya, serta pelestarian dan revitalisasi warisan budaya desa. Pemanfaatan potensi budaya akan memperkuat identitas desa, meningkatkan nilai jual produk lokal,

serta memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat (Fitryani et al., 2021).

c. Sumber Daya Manusia

Masyarakat desa merupakan aset berharga yang memegang peranan krusial dalam pembangunan desa. Identifikasi sumber daya manusia, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan potensi kreatif masyarakat, menjadi langkah penting dalam mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, masyarakat dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan (Salma et al., 2021).

Pentingnya identifikasi potensi desa ini menekankan pada pentingnya pendekatan partisipatif dalam proses identifikasi. Melibatkan masyarakat dalam pengenalan dan analisis potensi desa akan memastikan bahwa identifikasi yang dilakukan mencerminkan realitas lokal, kebutuhan masyarakat, serta aspirasi mereka terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui identifikasi potensi desa yang komprehensif dan partisipatif, langkah pertama menuju Welfare Village dapat ditempuh dengan lebih terarah dan efektif. Identifikasi ini akan menjadi dasar bagi perencanaan strategis dan implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa (Nursalam, 2021; Sumbawati et al., 2021).

Partisipasi Masyarakat: Masyarakat desa harus terlibat secara aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait juga penting dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur kunci dalam proses pembangunan desa yang berhasil dan berkelanjutan. Masyarakat desa yang terlibat secara aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan potensi lokal mereka. Partisipasi ini menciptakan ikatan yang kuat antara masyarakat dengan proses pembangunan, sehingga memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan relevan, diterima, dan didukung oleh masyarakat (Suprpto & Ayuba, 2021).

Dalam konteks pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai pelaku atau penerima, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki suara dan hak untuk berkontribusi dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengidentifikasian masalah, perumusan rencana, hingga implementasi dan evaluasi program pembangunan.

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait juga memegang peranan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator, penggerak, dan

regulator dalam proses pembangunan desa. Melalui kebijakan, program, dan alokasi sumber daya yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa (WISMAYANTI, 2020).

Stakeholder lainnya, seperti organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional, juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat inisiatif pembangunan desa yang dijalankan.

Dengan partisipasi masyarakat yang aktif dan dukungan dari berbagai pihak terkait, pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai proses, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang mengedepankan keadilan, keterlibatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap upaya pembangunan desa (Umam et al., 2020).

Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas desa dengan wilayah lainnya.

Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mencakup jaringan transportasi yang lancar, tetapi juga infrastruktur pendukung lainnya seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang berkualitas akan memperluas aksesibilitas, meningkatkan konektivitas, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta sosial masyarakat desa (Wardana, 2021; Zitri et al., 2020).

Infrastruktur transportasi yang baik, misalnya, akan mempermudah mobilitas masyarakat, menghubungkan desa dengan pasar, pusat pelayanan kesehatan, sekolah, dan area lainnya. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan akses pasar dan peluang kerja, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti listrik dan air bersih menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Listrik yang stabil akan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, sementara akses air bersih yang memadai akan memastikan kebutuhan dasar seperti kebersihan, sanitasi, dan kesehatan terpenuhi dengan baik.

Infrastruktur telekomunikasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas desa dengan dunia luar, memfasilitasi akses informasi, pendidikan, dan komunikasi. Ketersediaan teknologi

informasi dan komunikasi yang baik akan memperluas wawasan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta mendukung inovasi dan pengembangan usaha lokal (Lili & Lasso, 2020; M.Si S.IP., 2021).

Dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif. Pendekatan yang holistik dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur akan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang desa, menjawab tantangan, serta memanfaatkan peluang yang muncul di masa depan.

Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti pertanian organik, pariwisata berbasis budaya, dan kerajinan lokal, dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan pilar penting dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan bukan hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa terhadap fluktuasi ekonomi global dan nasional. Beberapa sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di tingkat desa antara lain adalah pertanian organik, pariwisata berbasis budaya, dan kerajinan lokal (Maylinda & Sudarmono, 2021).

a. Pertanian Organik

Pertanian organik menawarkan peluang besar bagi desa-desa di Indonesia untuk mengembangkan produksi pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Mengadopsi praktik pertanian organik tidak hanya mendukung keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Produk pertanian organik cenderung memiliki harga jual yang lebih tinggi di pasaran karena permintaan konsumen yang semakin sadar akan kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pertanian organik juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen pertanian berkelanjutan, dan memperkuat hubungan antara petani dengan konsumen melalui program penjualan langsung atau pemasaran berbasis komunitas (Widiyanto, 2019).

b. Pariwisata Berbasis Budaya

Pariwisata berbasis budaya memanfaatkan kekayaan budaya, sejarah, dan tradisi lokal sebagai daya tarik utama. Desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar dalam menawarkan pengalaman pariwisata yang otentik dan berbeda dari destinasi pariwisata mainstream. Melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya, masyarakat desa dapat memanfaatkan aset budaya mereka sebagai sumber pendapatan baru, seperti homestay, tur budaya,

workshop kerajinan, dan festival budaya. Selain itu, pariwisata berbasis budaya juga dapat mempromosikan pelestarian warisan budaya, mendorong interaksi antarbudaya, serta memperkuat identitas dan kebanggaan lokal (Kamaruddin et al., 2021).

c. Kerajinan Lokal

Kerajinan lokal merupakan manifestasi kreativitas, keahlian, dan tradisi masyarakat desa yang dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Dari pembuatan tekstil tradisional, kerajinan anyaman, hingga keramik dan perhiasan, kerajinan lokal menawarkan berbagai produk unik yang memiliki potensi pasar baik di tingkat lokal maupun internasional. Pengembangan kerajinan lokal dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan desain, pemasaran digital, serta kolaborasi dengan desainer dan pelaku bisnis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai tambah produk.

Pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan (Aziz & Irmawati, 2021).

Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat desa tentang berbagai keterampilan dan teknologi baru akan membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat desa dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan investasi strategis yang penting dalam memperkuat fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa akan memberikan mereka alat yang dibutuhkan untuk beradaptasi, berinovasi, dan bersaing dalam lingkungan yang semakin dinamis dan kompetitif (Barnawi, 2020; Komariah et al., 2021).

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di desa merupakan langkah awal untuk mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Dengan mendirikan sekolah yang berkualitas, menyediakan sarana belajar yang memadai, serta mendukung program pendidikan inklusif, masyarakat desa dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dapat memperluas akses ke sumber belajar, meningkatkan keterampilan digital, dan mempersiapkan generasi

muda untuk menghadapi era digitalisasi yang sedang berlangsung.

b. Pelatihan Keterampilan dan Teknologi

Selain pendidikan formal, pelatihan keterampilan dan teknologi juga merupakan komponen penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat desa. Program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis, seperti pertanian berkelanjutan, teknologi informasi, manajemen bisnis, dan kerajinan tangan, dapat membantu masyarakat desa memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dan mengembangkan usaha mandiri. Selain itu, pelatihan juga dapat mencakup literasi keuangan, kewirausahaan, dan kepemimpinan untuk membangun kapasitas individu dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan yang tepat, serta memimpin inisiatif pembangunan yang berkelanjutan (Pradita, 2020).

c. Pendidikan Lingkungan dan Kesadaran Berkelanjutan

Pendidikan lingkungan dan kesadaran berkelanjutan menjadi aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta praktik-praktik hidup yang ramah lingkungan dapat mendorong adopsi perilaku dan keputusan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat mengembangkan sikap proaktif terhadap isu-isu lingkungan, menjadi agen perubahan, serta berkontribusi aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Rianto et al., 2021).

Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, pendidikan dan pelatihan dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun kapasitas masyarakat desa, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global, serta memanfaatkan peluang pembangunan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan desa. Melalui investasi yang tepat dalam pendidikan dan pelatihan, diharapkan masyarakat desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan, inovasi, dan transformasi menuju desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan Desa Sejahtera atau Welfare Village yang berkelanjutan dan inklusif, ada beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan desa. Kesuksesan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh aspek infrastruktur fisik semata, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait dan berinteraksi.

Pertama, identifikasi potensi desa sebagai langkah awal dalam pembangunan desa merupakan fondasi penting yang menentukan arah dan strategi

yang akan diambil. Potensi desa, baik itu potensi alam, budaya, maupun sumber daya manusia, harus dikenali dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan Desa Sejahtera yang partisipatif dan inklusif. Masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama harus memiliki peran yang proaktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan.

Ketiga, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas layanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Keempat, pengembangan ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor ekonomi, seperti pertanian organik, pariwisata berbasis budaya, dan kerajinan lokal, akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa terhadap fluktuasi ekonomi global dan nasional.

Kelima, pendidikan dan pelatihan merupakan investasi strategis yang penting dalam memperkuat kapasitas dan daya saing masyarakat desa. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memberikan pelatihan keterampilan dan kesadaran berkelanjutan, akan mempersiapkan masyarakat desa menghadapi tantangan dan peluang dalam era globalisasi dan digitalisasi.

Saran

Dalam upaya mewujudkan Desa Sejahtera yang berkelanjutan dan inklusif, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengembangkan program identifikasi potensi desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengenalan dan pemanfaatan potensi desa untuk pembangunan berkelanjutan.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program pembangunan melalui mekanisme partisipatif dan inklusif.
3. Prioritaskan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Memberikan dukungan dan insentif bagi pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis budaya, dan kerajinan lokal.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi dan digitalisasi.

Dengan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan Desa Sejahtera yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan desa di Indonesia.

5. REFERENSI

- Aziz, F., & Irmawati, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). In *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)* (Vol. 1, Issue 2). Center for Journal Management and Publication, Lambung Mangkurat University. <https://doi.org/10.20527/pakis.v1i2.4003>
- Barnawi, B. (2020). Eksistensi Home Industri Kerajinan Anyaman Bambu di Heuleut Leuwimunding Majalengka di Era Revolusi Industri 4.0. In *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1, p. 34). Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. <https://doi.org/10.47453/etos.v1i1.195>
- Fitryani, V., Kurniawansyah, K., & Komalasari, L. (2021). KONTRIBUSI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Studi di Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Tahun 2016-2020). In *Jurnal Ekonomi & Bisnis* (Vol. 9, Issue 3, pp. 268–275). Universitas Samawa. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.512>
- Gai, A. M., Witjaksono, A., Sai, S. S., & Kurniawati, L. (2024). *SUITABILITY OF THE INFRASTRUCTURE POLICY TO SPATIAL POVERTY BASED ON THE SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH IN LABUAN BAJO, WEST MANGGARAI DISTRICT*. 1–13.
- Hidayat', B. A. et al. (2023). *Pembangunan Desa Inklusif dan Berkelanjutan* (1 (ed.)). Amerta Media.
- Kamaruddin, K., Sutama, I. N., & Suhaima, S. (2021). ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh). In *Jurnal Ekonomi & Bisnis* (Vol. 9, Issue 1, pp. 33–39). Universitas Samawa. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i1.484>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Rukmana, E. N. (2021). Pelayanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Desa Jendela Dunia Kabupaten Kuningan Jawa Barat. In *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (Vol. 17, Issue 1, pp. 112–127). Universitas Gadjah Mada. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.1298>
- Lili, L. O., & Lasso, A. H. (2020). PERAN PEMERINTAH DESA KEDITAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA. In *KRITIS* (Vol. 29, Issue 2, pp. 102–119). Universitas

- Kristen Satya Wacana. <https://doi.org/10.24246/kritis.v29i2p102-119>
- M.Si S.I.P., N. M. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBANGUNAN DESA DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI (Studi Kasus di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci). In *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA* (Vol. 4, Issue 1, pp. 62–72). STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh. <https://doi.org/10.51279/jan.v4i1.483>
- Maylinda, E., & Sudarmono, S. (2021). PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA ADAT OSING KABUPATEN BANYUWANGI. In *Jurnal Environmental Science* (Vol. 4, Issue 1). Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. <https://doi.org/10.35580/jes.v4i1.20452>
- Murthi, N. W., Utama, M. S., Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Government role, BUMDes performance on inclusive growth in coastal village, Badung Regency. *International Journal of Health Sciences*, 6(July), 8879–8890. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns5.11797>
- Nursalam, N. (2021). Pelatihan perencanaan pembangunan bagi aparatur desa di Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. In *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–13). Universitas Mataram. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v1i1.23>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Pradita, F. (2020). Otonomi Desa Dan Efektifitas Efisiensi Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo. In *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* (Vol. 11, Issue 1). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://doi.org/10.30996/die.v11i01.3399>
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- Rianto, F., Jenawi, B., & Sujarwani, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata pada Desa Pesisir di Kabupaten Bintan. In *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* (Vol. 6, Issue 1, pp. 623–631). University of Kanjuruhan Malang. <https://doi.org/10.21067/jpm.v6i1.4049>
- Salma, S. A., Putri, V. A., Fikri, A. F., & Nawangsari, E. R. (2021). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. In *Jurnal Syntax Transformation* (Vol. 2, Issue 5, pp. 681–695). Ridwan Institute. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.280>
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(9), 1689–1699.
- Smith, J., & Johnson, K. (2018). Welfare Village: A holistic approach to rural development. *Journal of Rural Studies*, 64, 45–56.
- Sumbawati, N. K., Syafruddin, S., & Gunawan, N. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BRANG KOLONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA. In *Jurnal Ekonomi & Bisnis* (Vol. 9, Issue 1, pp. 26–32). Universitas Samawa. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i1.483>
- Suprpto, S., & Ayuba, M. (2021). TRANSPARANSI PENGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN MAHYANI DI DESA LELATO KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA. In *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public* (Vol. 3, Issue 2, p. 51). Universitas Muhammadiyah Gorontalo. <https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.51-58.2020>
- Sutopo, D. S., Shabrina, D. N., Ilmu, F., Politik, I., & Brawijaya, U. (2022). *Sprektrum Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa*. 8(1), 57–68.
- Umam, C., Pangesti, F. S. P., & Yuslistyari, E. I. (2020). PEMBERDAYAAN POKDARWIS TAZGK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KADUENGANG. In *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1, p. 17). Universitas Padjadjaran. <https://doi.org/10.24198/sawala.v1i1.25838>
- Wardana, D. J. (2021). POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA. In *Jurnal Justiciabelen* (Vol. 2, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Gresik. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.2278>
- Widiyanto, I. F. (2019). Membangun Ruang Kreatif Desa Perdamaian di Dusun Srumbung Gunung, Desa Poncoruso “Mewujudkan Persatuan Dalam Perbedaan.” In *JURNAL TATA KELOLA SENI* (Vol. 4, Issue 2, pp. 72–83). Institut Seni Indonesia Yogyakarta. <https://doi.org/10.24821/jtks.v4i2.3084>
- WISMAYANTI, K. W. D. W. I. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI (Studi kasus: Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). In *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* (Vol. 2, Issue 1, p. 40). Universitas Udayana.

<https://doi.org/10.24843/jiwsp.2020.v02.i01.p05>

- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Journal of Governance and Local Politics* (Vol. 2, Issue 2, pp. 164–190). Universitas Pancasakti Makassar.
<https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>